

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi pada tiap daerah akan memberikan kesempatan dibukanya kesempatan bagi tiap SKPD yang merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintah daerah serta kepentingan masyarakat daerah setempat secara mandiri. Pemerintah daerah khususnya pemerintahan.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Kinerja sector publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Mahoney *et. al.* (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah.

Torang (2013) kinerja manajerial adalah hasil pekerjaan seseorang yang sesuai dengan standar, norma, aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja manajerial SKPD mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi SKPD. Selain itu kinerja manajerial sebagai strategi SKPD dalam mengindikasikan tingkat kegagalan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pentingnya penilaian kinerja manajerial karena pengukuran kinerja menunjukkan seberapa bagus kinerja organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas (Putra, 2013).

Faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial aparatur daerah adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan asas yang mengatakan bahwa semua dari penyelenggaraan kegiatan daerah kesemuanya dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Sopannah dan Wahyudi, 2010)

Penyelenggaran pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik (Mardiasmo, 2009). Sejalan dengan kewenangan dan keleluasaan yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemda Kota maupun Kabupaten untuk mengatur rumah tangganya, terutama dari segi pembiayaan daerah, maka hal tersebut telah memaksa para aparat daerah, teristimewa para aparatur pemerintah daerah untuk terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerahnya.

Adanya pengetahuan mengenai sasaran yang telah dianggarkan dan informasi mengenai tingkat dimana sasaran tersebut telah tercapai memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan mengontrol biaya. Komunikasi sasaran yang dianggarkan secara menurun di suatu organisasi memberi informasi kepada para anggota manajemen yang lebih rendah mengenai apa yang diharapkan manajemen tingkat atas. Selanjutnya, informasi anggaran membantu manajemen tingkat atas untuk mengevaluasi kinerja para manajer tingkat lebih rendah dan memberikan reward atau hukuman Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran diperkirakan dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pengendalian intern diperkirakan merupakan variabel yang memediasi hubungan tidak langsung antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien Selain itu, anggaran juga merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan sumberdaya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan.

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran. **“Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)’.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupatn Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupatn Rokan Hulu.?
3. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupatn Rokan Hulu .?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupatn Rokan Hulu

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Kantor

Sebagai bahan untuk pegawai SKPD yang terlibat dalam penyusunan anggaran agar lebih memahami Pengaruh Akuntabilitas publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial supaya dapat menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih baik.

2. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang di dapat dari bangku kuliah dengan praktek dilapangan.

3. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja menejerial.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dan mengingat bahwa luasnya masalah yang akan diteliti maka peneliti membatasi pada Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja

Manajerial pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu (Studi Empiris pada kabupaten Rokan Hulu) yang ada di kompleks perkantoran pemda Kabupaten Rokan Hulu

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Oleh Deki Putra, Universitas Negeri Padang Tahun 2013 yang berjudul pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota padang).hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik dan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja seperti terlihat pada nilai t hitung $3,362 > t$ -tabel $1,690$ dan tingkat signifikansi $0,72$ variabel independen. Dan

Kejelasan sasaran anggaran variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, hal ini dilihat dari $5888 > t$ hitung $> t$ -tabel dengan taraf signifikan $0,000 < 1,690$. Dan dari ANOVA (analisis varians) atau uji F, diperoleh sebesar $26.904 > F$ hitung $> F$ -tabel 4.130 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan kata lain, akuntabilitas publik dan kejelasan target anggaran secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian dan tahun amatan. Objek penelitian ini adalah terdaftar di SKPD Kabupaten Rokan Hulu, tahun amatan 2018 sedangkan penelitian deki putra objeknya Satuan Kerja Perangkat Daerah kota padang tahun 2013.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel penelitian, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh beserta pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut Harefa (2008 :17) pengertian kinerja manajerial adalah adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para aparatur dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab aparatur daerah dalam menjalankan operasional SKPD. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitaas dan kualitas yang terukur.

Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dapat diketahui bilamana seluruh aktivitas tersebut dapat diukur. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat instansi tersebut

Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah *performance* yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

2.1.1 Indikator Kinerja Manajerial

Menurut Mahoney *et. al* (1963) dalam Natalia (2010) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator :

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.

5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
6. Pemilihan Staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

Menurut Wayan (1997) dalam Septi (2010), kinerja pemerintah daerah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

2.2 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2009). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.2.1 Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber dana yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundangundangan yang berlaku, dan apakah penggunaan dana telah sesuai dengan prinsip - prinsip pengelolaan sebagaimana termuat dalam prinsip tata kola pmintah yang baik

2.2.2 Sifat Akuntabilitas Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009:21), laporan keuangan pemerintah dapat dipakai untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association (1970) dalam Sadjiarto (2000:140) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai suatu entitas pemerintahan dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

- a. Sumber daya finansial
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
- c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektivitas.

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Mardiasmo (2009:226) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer

publik untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Halim dan Syam Kusufi (2012) mengatakan bahwa anggaran memiliki peranan penting dalam organisasi sector publik, terutama organisasi pemerintah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah (Syafrial, 2009). Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu anggaran merupakan pernyataan mengenai testimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61)

Banyak factor yang dapat mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) salah satu diantaranya adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan SKPD untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah (Nadirsyah, dkk, 2012).

Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut.

Anggaran merupakan kata benda, yaitu hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan, yang menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan, penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu dan akhirnya tahap pengawasan. Menurut Dedi (2008), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Kenis (1979) dalam Syafrial (2009) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Locke dan Lathan (1984) dalam Samuel (2008) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Menurut Steers dan Porter (1976) dalam Samuel

(2008) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

1. Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

2.3.1 keuntungan kejelasan sasaran

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

2.4 Penelitian Yang Relevan

- 1 Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang) Deki Putra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (Periode 2013)

Hasil Penelitian :

- a. Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD (H1 diterima)
 - b. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD (H2 diterima)
- 2 Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dalam Penggunaan Dana Respek Pada Perangkat Daerah Kampung Onggaya Oleh Okto Irianto dan Henie Poerwandar Asmaningrum, Universitas Musamus Merauke Tahun 2014

Hasil Penelitian :

- a. menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik dan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja seperti terlihat pada nilai t hitung $3,362 > t$ -tabel $1,690$ dan tingkat signifikansi $0,72$ variabel independen.
- b. Kejelasan sasaran anggaran variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, hal ini dilihat dari $5888 > t$ hitung $> t$ -tabel dengan signifikan $0,000 < 1,690$. Dan dari ANOVA (analisis varians) atau uji F, diperoleh sebesar $26.904 > F$ hitung $> F$ -tabel 4.130 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan kata lain, akuntabilitas publik dan

kejelasan target anggaran secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

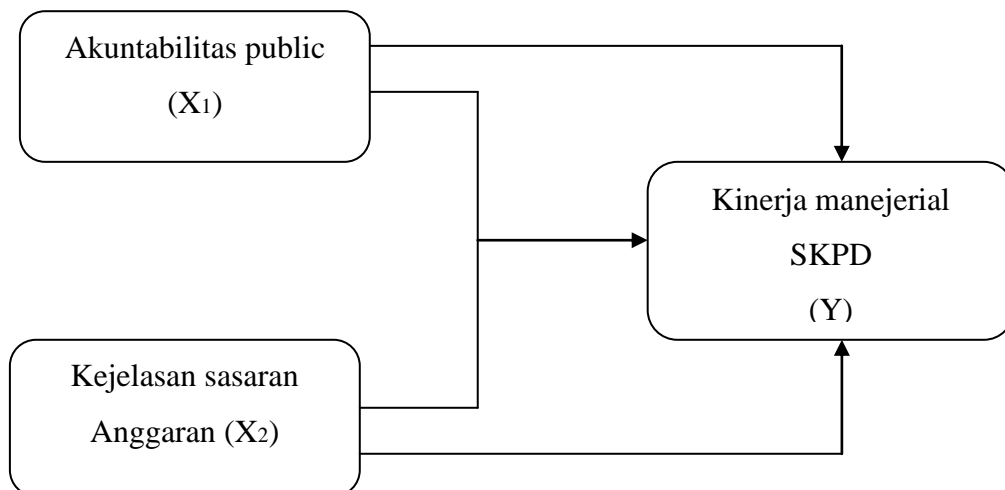
- 3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga) Oleh Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman, Universitas Diponegoro Tahun 2013

Hasil Penelitian :

- a. menunjukkan bahwa efek langsung dari kejelasan sasaran anggaran akuntabilitas kinerja pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran juga secara signifikan mempengaruhi sistem pengendalian internal. Kejelasan tujuan anggaran secara tidak langsung mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah melalui variabel intervensional sistem pengendalian internal.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skematis Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dalam penelitian dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Diduga bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Rokan Hulu.
- H2 : Diduga bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Rokan Hulu.
- H3 : Diduga bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial .

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independen dengan kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai variabel dependennya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement sampling*. *Judgement sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Dimana yang menjadi sampel dalam penelitaian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 29 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan SKPD dan 2 orang kepala bagian pada masing-masing SKPD

**Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
SKPD Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu**

No	NAMA DINAS, BADAN DAN KANTOR
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRATARIAT DEWAN
3	INSPEKTORAT
4	DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	DINAS KESEHATAN
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9	DINAS TANAMAN PAGAN DAN HOLTIKULTURA
10	DINAS PERTERNAKAN DAN PERKBUNAN
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN
12	DINAS KOPERASI DAN UKM,TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
13	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
21	DINAS PERHUBUNGAN
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
25	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
27	BADAN PENDAPATAN DARAH
28	BADAN KSATUAN BANGSA DAN POLITIK
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Teknik pengambilan yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011 : 156) sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel . Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan cara survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden, demikian pula pengembalianya

dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner kepada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Operasional merupakan suatu tindakan yang membuat batasan-batasan yang akan digunakan dalam analisis. Adapun yang akan di analisis adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. pengamatan akan dapat mendeteksi atau menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

a. Akuntabilitas Publik (X1)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2009)

b. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Tabel 3.1
Definisi dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional Indikator	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas Publik (X1)	Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.	1. Kebijakan 2. Program 3. Manajerial 4. Manfaat 5. Horizontal	Skala Likert
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu karakteristik sistem penganggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar	1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka Waktu 5. Sasaran Prioritas 6. tingkat kesulitan 7.koordinasi	Skala Likert

	anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran ebut.		
Kinerja manajerial (Y)	Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, representasi, dan erja secara keseluruhan.	1. Perencanaan 2. Investigasi 3. Koordinasi 4. Evaluasi 5. pengawasa	Skala Likert

3.6.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, didalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner. Suatu instrument dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi persaratan yaitu uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . nilai t_{hitung} merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan disetiap variabel dan dianalisis dengan program SPSS dan outputnya bernama *corrected item correlation*. Untuk mendapatkan t_{tabel} dilakukan dengan tabel *product moment*. Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner dapat ditentukan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dikatakan valid, dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak valid.

2. Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas adalah uji tingkat kesetabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reabilitas, semakin stabil pula alat pengukur tersebut dan sebaliknya jika reabilitas alat pengukur tersebut rendah maka alat yang dimiliki tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas menggunakan uji *cronbach's alpha* (α) yaitu jika $\alpha > 0,60$ maka variabel dikatakan reliable atau handal.

3.7 Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi.

3.7.1 Statistik deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya pengukuran secara kuantitatif dari hasil pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan untuk selanjutnya dilakukan analisis data pengukuran tersebut. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu data yang terkumpul kemudian dikategorikan menurut kriterianya masing-masing dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisa secara deskriptif berdasarkan teori-teori yang ada.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal. Analisis yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan uji *kolmogrof-smiernov*

test dengan ketentuan jika nilai signifikan *kolmogrof-smiernov test* pada variabel lebih besar dari nilai signifikansi ($\alpha > 0,05$) yang telah ditetapkan maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *kolmogrof-smiernov test* pada variabel lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha < 0,05$) maka tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui dan mengukur ada atau tidak pengaruh antara beberapa variabel independen, akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel dependen yaitu kinerja manajerial. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan memanfaatkan software statistik SPSS (*Statistic Product and Service Solution*). Menurut Sugiyono, persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = kinerja manajerial

a = Konstanta

b_1b_2 = Koefisiensi regresi

X_1 = Akuntabilitas pablik

X_2 = Kejelasan sasaran anggaran

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah persamaan statistik yang digunakan untuk mengetahui ketepatan hubungan satu variabel atau lebih terhadap variabel dependennya dalam satu persamaan regresi linier berganda. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R^2). Dalam aplikasi SPSS angka yang digunakan untuk melihat koefisien determinasi yaitu angka R^2 adjusted, dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel.

3.7.5 Uji Signifikan Secara Individu (Uji t)

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara individual terhadap variabel terikat (dependen). Dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat ditentukan H_0 diterima atau H_0 ditolak.

Jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian

menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).

3.7.6 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersamaan (akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran) terhadap variabel terikat yaitu Kinerja manajrial.

Jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).